

**PENGUATAN KELEMBAGAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PELAKSANAAN MUSRENBANGDES DI KOTA TERPADU
MANDIRI DESA SUNGAI RAMBUTAN OGAN ILIR 2021**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

**BENNY AGUSTIAN
NIM. 07011081924234**

Dosen Pembimbing :

**Dra. Retno Susilowati, MM
NIP.195905201985032003**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
APRIL 2022**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“PENGUATAN KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DALAM PELAKSANAAN MUSRENBANGDES DI KOTA TERPADU
MANDIRI DESA SUNGAI RAMBUTAN OGAN ILIR 2021”**

Skripsi

Oleh :
BENNY AGUSTIAN
07011081924234

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 06 April 2023

Pembimbing :

1. Dra. Retno Susilowati, MM
NIP.195905201985032003

Tanda Tangan



Penguji :

1. Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA
NIP. 199310072019031012
2. Annada Nasyaya S.IP., M.SI
NIP. 198809062019032016

Tanda Tangan



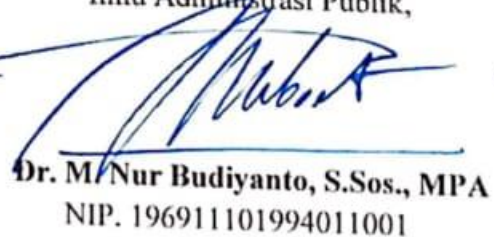
Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI
PENGUATAN KELEMBAGAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PELAKSANAAN
MUSRENBANGDES DI KOTA TERPADU MANDIRI SUNGAI
RAMBUTAN OGAN ILIR

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

BENNY AGUSTIAN
NIM.07011081924234

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 03 April 2023

Pembimbing

Dra. Retno Susilowati, MM
NIP.195905201985032003



Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

LEMBAR PENYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Benny Agustian

Nim : 07011081924234

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Penguatan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Musrenbangdes Di Kota Terpadu Mandiri Desa Sungai Rambutan, Ogan Ilir" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun

Yang membuat pernyataan

Indralaya 03 April 2023


METERAI
TEMPEL
303AIX75094750
Benny Agustian
NIM. 07011081924234

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Tetaplah menjadi baik dan sabar dalam situasi dan kondisi apapun”

“Yang harus kita perhatikan dalam hidup ini adalah bagaimana respon kita kepada orang lain, bukan bagaimana perlakuan orang lain kepada kita, ingat dan control diri selalu”

PERSEMBAHAN

Terimakasih kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, Skripsi ini saya persembahkan untuk Ibuk, Bapak, Adik, serta keluarga tercinta

ABSTRACT

This study discusses the Institutional Strengthening of Village Consultative Bodies (BPD) in the implementation of Musrenbangdes in the Independent Integrated City of Sungai Rambutan Ogan Ilir Village, which was then analyzed using the theory of Institutional Strengthening according to Deborah Eade (1998), namely, Organization, Human Resources, Finance, Infrastructure, and Cooperation. The research method used is qualitative research that is descriptive. The data sources used are primary data and also secondary data. For data collection, namely through interviews, observation, documentation, and also literature studies. The results of this study show that the Sungai Rambutan Village Consultative Body has not been optimal enough in its work on the implementation of Musrenbangdes. It is known that there is still no maximum of BPD Sungai Rambutan members in attendance at meetings / meetings held, there is no means of improving self-quality received, to the lack of infrastructure for BPD Sungai Rambutan which will certainly affect the implementation of Musrenbangdes and other activities managed by BPD. Therefore, institutional strengthening is needed for BPD Sungai Rambutan to be more qualified in its quality so that effectiveness in carrying out its duties can be achieved, one of which is the implementation of Village Development Planning Deliberation.

Keywords: Musrenbangdes, BPD, institutional strengthening

Advisor



Dra. Retno Susilowati, MM
NIP.195905201985032003

Indralaya 03 April 2023
Head Of Public Administration Department
Faculty Of Social And Political Science Sriwijaya University



Dr. M Nur Budiwanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Penguatan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Kota Terpadu Mandiri Desa Sungai Rambutan Ogan Ilir, yang kemudian dianalisis menggunakan teori Penguatan Kelembagaan menurut Deborah Eade (2014) yaitu Individu, Organisasi dan *Network*. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan juga data sekunder. Untuk pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan juga studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Sungai Rambutan belum cukup optimal dalam kerjanya pada pelaksanaan Musrenbangdes. Hal ini diketahui bahwa masih belum maksimalnya anggota BPD Sungai Rambutan dalam kehadiran pada rapat/pertemuan yang diadakan, belum adanya sarana peningkatan kualitas diri yang diterima, hingga masih kurangnya infrastruktur bagi BPD Sungai Rambutan yang mana tentu akan berpengaruh dalam pelaksanaan Musrenbangdes dan kegiatan lainnya yang dikelola oleh BPD. Maka diperlukan penguatan kelembagaan bagi BPD Sungai Rambutan agar lebih mumpuni dalam kualitasnya sehingga bisa tercapai keefektifan dalam menjalankan tugasnya, salahsatunya adalah pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Kata Kunci: Musrenbangdes, BPD, Penguatan Kelembagaan

Pembimbing



Dra. Retno Susilowati, MM
NIP.195905201985032003

Indralaya, 03 April 2023

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatu

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat-Nya dan atas izin-Nya penulis masih diberikan kesempatan dalam menyelesaikan usulan penelitian dengan judul “Penguatan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Musrenbangdes Di Kota Terpadu Mandiri Sungai Rambutan Ogan Ilir”. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.

Selama dalam proses penyelesaian Skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan juga dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan atas izin-Nya penulis bisa menyelesaikan Proposal Skripsi ini
2. Nabi Muhammad SAW sebagai Suri Tauladan yang telah membawa ajaran serta perubahan sehingga menjadi sosok yang penulis idolakan
3. Kedua orang tua tercinta Bapak Usman bin Muhamad Zen dan Ibu Supiah binti Rozali yang sangat berjasa dan telah memberikan dorongan serta doa kepada penulis
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya
5. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

7. Bapak Januar Eko Aryansyah, S.IP., SH., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya
8. Bapak DRS. Gatot Budiarto, MS selaku Dosen Pembimbing Akademik
9. Ibu Dra. Retno Susilowati, MM selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah banyak membantu dalam proses penyelesaian Skripsi ini
10. Bapak Khairunnas S.IP., M.I.Pol serta Bapak Rahmat Rafinzar S.I.P., M.A.P saya ucapkan banyak terimakasih banyak karena telah turut membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya selama perkuliahan hingga saat ini
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan bantuan selama perkuliahan dan seluruh karyawan FISIP yang telah membantu penulis dalam skripsi ini
12. Teman seperjuangan Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik angkatan 2019 yang sudah menemani bersama dalam menimba ilmu selama di Universitas Sriwijaya

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna seperti apa yang diharapkan. Maka dari itu penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun agar lebih baik kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk siapa saja yang membaca, Terimakasih.

Indralaya 03 April 2023



Benny Agustian

NIM. 07011081924234

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENYATAAN ORISINALITAS.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xivv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	10
1.3.2 Manfaat.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori	12
2.2 Pengertian Administrasi Publik.....	12
2.3 Pengertian Manajemen Publik.....	15
2.4 Penguatan Kelembagaan	17
2.4.1 Pengertian Penguatan Kelembagaan.....	17
2.4.2 Teori-teori Penguatan Kelembagaan	20
2.5 Teori yang digunakan	22
2.6 Kerangka Berpikir	26
2.7 Penelitian terdahulu	27
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Definisi Konsep.....	35

3.3 Fokus Penelitian	36
3.4 Jenis dan Sumber Data	37
3.5 Informan Penelitian	38
3.6 Teknik Pengumpulan Data	39
3.7 Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	44
4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Ogan Ilir.....	44
4.1.2 Kondisi Geografis Kabupaten Ogan Ilir	45
4.1.3 Indralaya Utara.....	48
4.1.4 Luas Wilayah Menurut Desa Dalam Kecamatan Indralaya Utara	48
4.1.5 Desa Sungai Rambutan	51
4.1.6 Geografis Desa Sungai Rambutan	51
4.1.7 Struktur Pemerintaha Desa.....	52
4.2 Gambaran Informan Penelitian	53
4.3 Hasil Penelitian.....	54
4.3.1 Organisasi.....	55
4.3.2 Sumberdaya Manusia	60
4.3.3 Keuangan.....	69
4.3.4 Infrastruktur.....	74
4.3.5 Kerjasama.....	78
4.4 Pembahasan	88
4.4.1 Organisasi	88
4.4.2 Sumberdaya Manusia.....	89
4.4.3 Keuangan	90
4.4.4 Infrastruktur	91
4.4.5 Kerjasama	92
BAB V PENUTUP.....	93
5.1 Kesimpulan.....	93
5.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95

DAFTAR LAMPIRAN.....100

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Hadir Peserta Musrenbangdes dan Jumlah Peserta Hadir	6
Tabel 2 Jumlah Penduduk Desa Sungai Rambutan	7
Tabel 3 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 4 Fokus Penelitian.....	37
Tabel 5 Informan Penelitian	39
Tabel 6 Jumlah Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir	46
Tabel 7 Luas Wilayah Menurut Desa Dalam Kecamatan Indralaya Utara	48
Tabel 8 Jumlah Penduduk Menurut Desa/ Kelurahan Di Kecamatan Indralaya Utara ...	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berpikir	26
Gambar 2 Komponen Analisis Data : Model Interaktif	43
Gambar 3 Administrasi Kabupaten Ogan Ilir	44
Gambar 4 Struktur Pemerintah Desa Sungai Rambutan, Ogan Ilir	52
Gambar 5 Visualisasi Data Dimensi Organisasi	58
Gambar 6 Daftar hadir Musrenbangdes Sungai Rambutan.....	63
Gambar 7 Visualisasi data dimensi Sumberdaya Manusia	68
Gambar 8 Pagu Indikatif Desa Sungai Rambutan 2021	73
Gambar 9 Kantor Desa Sungai Rambutan, Ogan Ilir.....	76
Gambar 10 Tempat pelaksanaan Musrenbangdes Beserta Sarana Prasarana.....	77
Gambar 11 Daftar Hadir Peserta Musrenbangdes Tahun 2020.....	81
Gambar 12 Dokumentasi Pelaksanaan Musrenbangdes	81
Gambar 13 Visualisasi data dimensi Kerjasama	87

DAFTAR SINGKATAN

BPD : Badan Permusyawaratan Desa

RKPDes : Rancangan Kerja Pemerintah Desa

Musrenbangdes : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

PMD : Pemberdayaan Masyarakat Desa

RT : Rukun Tetangga

PLD : Pendamping Lokal Desa

PDTI : Pendamping Desa Teknik Infrastruktur

KPM : Kader Pembangunan Manusia

LINMAS : Perlindungan Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan dari terselenggaranya *Good Governance* yang sudah diterapkan sejak era reformasi berlangsung adalah dengan terciptanya sistem pemerintahan yang baik, bersih, rapi, dan juga pelayanan yang prima. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik bukanlah hal yang mudah, karena hal ini bukan hanya memerlukan waktu yang cukup, namun juga pelaksana yang mumpuni agar tak salah dalam pelaksanaannya.

Seperti yang sudah banyak kita lihat bagaimana penerapan prinsip *Good Governance* yang berlangsung, ada beberapa daerah dan juga organisasi yang bisa menerapkan hal itu dengan baik, namun tak sedikit juga masalah-masalah yang muncul sebagai bentuk masih buruknya sistem pemerintahan yang berjalan. Artinya menerapkan sebuah kebijakan tidaklah mudah, banyak faktor yang menjadi pendorong dan juga penghambat pelaksanaannya sehingga memerlukan kerjasama dan juga semangat yang kuat.

Tata kelola pemerintahan yang baik bukan hanya berlaku bagi instansi pemerintah pusat atau instansi besar saja, namun konsep ini harus menyebar luas sampai dengan organisasi kecil sekalipun. Dalam pengelolaannya, pemerintah harus bisa *manage* tata kelola dan juga konsep organisasi/instansi/lembaga yang rapi, pelayanan yang prima, dan juga pengelolaan dalam tugasnya yang baik.

Pemerintah daerah selaku organisasi yang mengakomodir seluruh kepentingan daerahnya tentu dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang baik bagi daerah yang dikelola. Segala yang menjadi urusan daerah harus bisa diselesaikan dengan seksama oleh pemerintah daerah. Konsep ini sama seperti yang sudah diterapkan sejak era reformasi berlaku yaitu dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah yang mana diharapkan mempermudah pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri.

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa salahsatu bentuk dalam mencapai *Good governance* ialah dengan diterapkannya kebijakan Otonomi Daerah dalam sistem pemerintahan yang berjalan. Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi dengan diterapkannya otonomi daerah maka diharapkan segala yang menjadi urusan daerah bisa diselesaikan dengan baik oleh daerah masing-masing. Hal ini tentu saja mengacu kepada hasil yang baik karena secara teknis otonomi daerah sudah memberikan kemudahan bagi setiap daerah untuk mengelola daerahnya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Daerah harusnya bisa berkembang jauh lebih baik dalam pemerintahannya. Dalam hal ini pemerintah daerah tentunya diharapkan akan lebih mudah dalam mencapai konsep *Good Governance* dikarenakan kebijakan Otonomi Dearah yang diberlakukan, sehingga hal tersebut akan dapat membantu pemerintah daerah dalam mencapai *Good Governance* yang sudah menjadi cita-cita negara Indonesia sejak lama.

Dalam sistem pemerintahan yang berjalan untuk mencapai keefektifannya dalam pengelolaan, diperlukan suatu penguat kelembagaan guna dalam meningkatkan dan menjaga kestabilan organisasi/lembaga. Penguatan kelembagaan merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas kerja ataupun kinerja bagi organisasi dan juga sumber daya manusia, baik individu maupun kelompok.

Penguatan kelembagaan juga disebut dengan usaha yang direncanakan untuk meningkatkan efektivitas kerja yang diharapkan mampu melakukan perubahan terhadap budaya kelembagaan ataupun organisasi kearah yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan tentu memerlukan kerjasama yang baik dalam melakukan perubahan dan juga penguatan, dan hal ini pastinya akan menyangkut setiap unsur didalam organisasi atau lembaga tersebut, salahsatunya yaitu sumber daya manusia.

Dalam menilai berhasil atau tidaknya konsep *Good governance* dan juga pengaplikasian kebijakan Otonomi daerah yang berjalan, tentu kita harus melihat sejauh mana upaya dan kondisi lembaga pemerintah dalam melakukan tugasnya. Salahsatu bentuk penilaian keberhasilan dari kinerja lembaga pemerintah baik dipusat maupun daerah adalah dengan terselenggaranya pembangunan yang merata dalam rangka mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini proses pembangunan didaerah didasari oleh sebuah sistem perencanaan pembangunan yang disebut dengan Musrenbangdes atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, disebutkan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan

Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Selain itu dalam Undang-undang No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dijelaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Pelaksanaan Musrenbangdes dikelola oleh Lembaga desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa , Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BPD bertanggungjawab melaksanakan kegiatan, dan juga pengawasan pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya. Selain itu BPD juga bertugas menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa untuk memberikan

pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan juga pembangunan fisik demi taraf hidup yang lebih baik. Peran BPD tentu sangat diperlukan karena menyangkut dengan kepentingan bersama didesa, dan masyarakat tentu memerlukan wadah sebagai tempat meluahkan aspirasinya.

Salah satu upaya pemerintah desa dalam memberikan kesempatan untuk masyarakat agar dapat ikut berpartisipasi dalam setiap proses penentuan kebijakan adalah dengan memberikan peluang kepada masyarakat untuk bisa terlibat langsung dalam pelaksanaan Musrenbangdes. Hal ini dikarenakan menyangkut dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdes ini sendiri.

Namun pada pelaksanaan Musrenbangdes di desa Sungai Rambutan, masih terdapat kendala yang menjadi penghambat dalam kegiatannya. Seperti keikutsertaan masyarakat yang kurang dalam Musrenbangdes, sehingga kinerja dari BPD itu sendiri selaku pengelola dalam hal ini dipertanyakan. Keikutsertaan ataupun partisipasi dari masyarakat merupakan unsur yang sangat penting karena menyangkut dengan pemahaman mereka itu sendiri terkait bagaimana pelaksanaan dan juga hasil dari musrenbangdes ini nantinya.

**Tabel 1 Daftar hadir peserta Musrenbangdes tahun 2020
dan jumlah peserta hadir**

No	Daftar peserta hadir	Jumlah
1	PMD	1 Orang
2	BPD	7 orang
3	Ketua RT	6 orang
4	Kepala Dusun	2 orang
5	Pemerintah desa	4 orang
6	Masyarakat	5 orang
7	Lembaga adat	1 orang
8	Daniyah	2 orang
9	PLD	1 orang
10	PDD	2 orang
11	PDTI	1 orang
12	KPM	1 orang
Total		34 Orang

Sumber : Dokumen Musrenbang Desa Sungai Rambutan Tahun 2021

Mengacu pada tabel daftar hadir peserta Musrenbangdes diatas, bisa kita lihat bagaimana keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdes di desa Sungai Rambutan sejauh ini masih tergolong sedikit. Hal ini seharusnya tentu menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan juga kebijakan dalam pelaksanaan Musrebangdes karena masyarakat merupakan unsur yang sangat penting bagi

setiap keputusan yang diambil. Selain itu Musrenbangdes juga sarana bagi masyarakat dalam mengekspresikan kebutuhan, kepentingan, dan juga menyampaikan aspirasinya.

Tabel 2 Jumlah Penduduk Desa Sungai Rambutan

Laki-laki	Perempuan	Jumlah KK
1460 Orang	1427 Orang	755 KK

Sumber : Dokumen RKP Desa Sungai Rambutan

Selain melihat dari data pada tabel 1, peneliti juga mengacu dari data pada tabel 2 dalam melihat ketidakefektifan kontribusi ataupun keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdes. Jumlah penduduk dengan data kehadiran masyarakat sangat berbanding jauh sehingga bisa disimpulkan bahwa keikutsertaan masyarakat masih sedikit dan perlu adanya peningkatan. Lembaga pemerintah desa harus bisa meningkatkan seluruh aspek bagu pelaksanaan Musrenbangdes agar Musrenbangdes bisa berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya.

Masalah kedua yang peneliti temui dilapangan yaitu belum adanya sosialisasi dari BPD terkait pelaksanaan Musrenbangdes sehingga tentu saja hal ini berpengaruh kepada partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdes. Karena salahsatu cara agar bisa menarik kemauan masyarakat yaitu dengan adanya sosialisasi yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa kepada masyarakat sekaligus memberikan pemahaman akan pentingnya Musrenbangdes sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.

Melihat masalah yang muncul diatas, peneliti menyimpulkan bahwa salahsatu penyebabnya adalah dikarenakan pengaruh dari unsur internal BPD itu sendiri yaitu kualitas Sumberdaya Manusia yang ada di BPD. Kualitas Sumberdaya Manusia berperan penting yang mana sebagai penyelenggara tentu BPD dituntut untuk bisa memberikan kinerja sebaik mungkin, baik dalam mengakomodir aspirasi masyarakat, hingga pelaksanaan Musrenbangdes yang berjalan dengan lancar. Namun pada temuan lapangan, masih terdapat kendala ataupun masalah-masalah yang ada, dan hal ini menunjukkan bahwa BPD belum cukup kuat untuk melaksanakan Musrenbangdes.

Dalam hal ini terdapat penelitian yang dilakukan oleh Astuti Rosyida Dwi et al., (2020) tentang Penguatan Kapasitas Kelembagaan BPD, temuan pada penelitian tersebut ialah bahwa BPD telah melakukan fungsi dan tugasnya, namun belum optimal dari sisi administrasi dan pembukuan yang terstruktur. Penelitian lain yang dilakukan oleh Susilowati et al., (2021) dengan judul Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Arto Desa Kenteng. Hasil penelitian ini menunjukkan peserta mulai memahami mekanisme pengusulan BUMDes. Namun BUMDes belum adanya standar operasional prosedur untuk melaksanakan kegiatannya seperti sistem pemberian gaji kepada para pekerja, pemasukan/penerimaan uang kas, pengeluaran kas, penjualan, dan pembelian.

Penelitian yang dilakukan oleh Saldi & Listyaningsih, (2019) tentang Penguatan Kelembagaan Kota Layak Anak di Kota Semarang, bahwa Masih adanya hambatan dalam pelaksanaan dilihat dari kelembagaan yang melaksanakannya belum memiliki komitmen dari sumberdaya yang ada dan kerjasama yang aktif belum terbangun. Kemudian

penelitian oleh Payapo, Thamrin, Muhammad et al., (2014) tentang Penguatan Kelembagaan KPU Provinsi Papua Barat dalam Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Pemilukada, diketahui faktor–faktor yang sering ditemukan dan mempengaruhi kualitas pemilukada adalah kondisi geografis, juga ditemukan terbatasnya sarana dan prasarana (perkantoran dan transportasi) dan lain-lain.

Selanjutnya penelitian yang sama dilakukan oleh Aziza, (2019) dan Novia et al., (2013) terkait Penguatan Kelembagaan Pangan dan juga Strategi Penguatan Kelembagaan Koperasi Produksi di PT. POLIPLANT CARGILL, diketahui bahwa perlunya strategi penguatan peran kelembagaan pangan, yaitu: Harmonisasi Kebijakan dan Perencanaan Program antar Kelembagaan Pangan dll, dan juga kunci yang perlu menjadi penting untuk ada pada Penguatan Kelembagaan Koperasi Produksi yaitu strategi SO melalui alternatif strategi dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan juga perluasan jaringan usaha.

Penelitian serupa terkait Pengembangan Kapasitas oleh (Hidayat et al., 2019), (Melinda et al., n.d.), Anwar & Fitriyarini, (2020), Alchalil et al., (2021), diketahui yaitu masih perlu adanya peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia, sarana prasarana, dan juga koordinasi yang jelas antar pelaku yang bersangkutan. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai pengembangan kapasitas seperti yang sudah digambarkan sebelumnya.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan diatas, bisa dilihat pada fokus penguatan kelembagaan BPD khususnya dalam pelaksanaan Musrenbangdes masih relatif sedikit dan bahkan belum ada. Sehingga hal inilah yang menjadi ketertarikan untuk

meneliti persoalan Penguatan Kelembagaan pada Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan Musrenbangdes di desa Sungai Rambutan Ogan Ilir.

Berdasarkan permasalahan terkait Penguatan Kelembagaan pada Badan Permusyawaratan Desa di Kota Terpadu Mandiri Sungai Rambutan Ogan Ilir, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul : Penguatan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Musrenbangdes di Kota Terpadu Mandiri Sungai Rambutan Ogan Ilir. Penelitian ini menggunakan Teori Penguatan Kelembagaan dari Deborah Eade (2014) sebagai pisau analisis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah “bagaimana penguatan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan Musrenbangdes di kota terpadu mandiri sungai rambutan, ogan ilir?”

1.3 Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah :

1.3.1 Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis penguatan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Musrenbangdes di Kota Terpadu Mandiri Sungai Rambutan, Ogan Ilir.

1.3.2 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis adalah :

- a. Manfaat Teoritis Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik khususnya terkait Penguatan Kelembagaan, serta sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya.
- b. Manfaat praktis Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat membantu memberikan masukan dan juga ide gagasan bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan Musrenbangdes di Desa Sungai Rambutan dan pemerintah desa Sungai Rambutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.); Vol. 1999, Issue December). CV Syakir Media Press.
- Abidin Jenal, Fedrina Rezka, A. R. A. (2022). *Penguatan Kelembagaan Desa Wisata melalui Promosi Digital Marketing di Desa Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang*. 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.36276/jap>
- Alam, R. S., & Rahmat, A. (2020). Pengaruh Penerapan Sanksi dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai dengan Disiplin Kerja Sebagai Intervening (Studi Dinas Perhubungan Kabupaten Siak Provinsi *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Terapan*, 2(1), 11–25. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/mbt/article/view/8578>
- Alchalil, A., Siraj, S., Nasrah, S., & Dahrum, D. (2021). Capacity building model development to improve the professionalism of vocational school teachers in the field of mechanical engineering expertise. *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 3(5), 348. <https://doi.org/10.29103/ijevs.v3i5.5976>
- Anwar, S., & Fitriyarini, I. (2020). *Progress in Social Development CAPACITY BUILDING STRATEGY IN SAMARINDA ROAD CLINIC STRATEGI PENGUATAN KAPASITAS (CAPACITY BUILDING) DI*. 1(2), 1–6.
- Astuti Rosyida Dwi, B., Wirawan, S., Widia, A., & Rakhmawati, I. (2020). *Penguatan Kapasitas Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*. 2, 2–3.
- Aziza, T. N. (2019). Upaya Penguatan Kelembagaan Pangan. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 3(1), 204–217. <https://jepa.ub.ac.id/index.php/jepa/article/view/159>
- Dewi, T. S. (2005). *Pengaruh Pembagian Kerja Terhadap Efektifitas Kerja Karyawan Pada Bagian Produksi PT.Dupantex Kabupaten Pekalongan*. 72. <http://lib.unnes.ac.id/463/1/1147.pdf>
- Hamdani, N. A., & Ramdhani, A. (2019). *Teori Organisasi (Konsep dan Aplikasi)*. 212.
- Hasrina, Y. (2015). *ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN RURAL*

INFRASTRUCTURE SUPPORT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (RIS-PNPM) DI ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT (OMS) KECAMATAN TUAH NEGERI KABUPATEN MUSI RAWAS.

- Hayat. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik* (Issue September). PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hidayat, M. N., Wirawan, I. B., & Wirawan, I. B. (2019). Capacity building among members of the Indonesian police during post-reform era. *Opcion*, 35(Special Issue 21), 85–100.
- Indriati, I. H. (2021). Pengaruh Struktur Organisasi, Fasilitas Kerja dan Beban Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai BPR Chandra Muktiartha Yogyakarta. *Jembatan: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 18(1), 14–28.
- Mambo, R. (2015). Pentingnya Peningkatan Sumberdaya Manusia Dalam Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 4(35), 1471.
- Melinda, R., Prastya Yudhi, I., & Edison. (n.d.). *PENGEMBANGAN KAPASITAS (CAPACITY BUILDING) KELEMBAGAAN PERPUSTAKAAN DESA STUDI PERPUSTAKAAN “CAHAYA DESA” DI DESA TOAPAYA KECAMATAN TOAPAYA KABUPATEN BINTAN*. 484–490.
- Miles B, M., Huberman Michael, A., & Saldana, J. (2020). *Qualitative Data Analysis* (H. Salmon (ed.); Vol. 21, Issue 1). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Mutiarin, D. (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan (Penelusuran Konsep dan Teori)* (A. Z. Dyah Mutiarin (ed.); 2nd ed.). PUSTAKA BELAJAR. <https://bit.ly/3Gcq19A>
- Novia, K., Yusra A Hamid, A., & Oktoriana, S. (2013). Strategi Penguatan Kelembagaan Koperasi Produksi Di PT. Poliplant Cargill Kabupaten Ketapang. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.

- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*.
- Payapo, Thamrin, Muhammad, R., Ruslan, A., & Halim, H. (2014). *Penguatan Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Dalam Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah*. 3(1), 90–100.
- Qadri Al, F. (2020). *Penguatan Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Enkerang*. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR.
- Resmiati Endah, Suryadi Soleh, I. R. (2021). *Penguatan Kelembagaan Teaching Factory Berbasis Potensi Wilayah Pada Sekolah Menengah Kejuruan Di Provinsi Banten*. 16.
- Saldi, P., & Listyaningsih, L. (2019). Penguatan Kelembagaan Kota Layak Anak di Kota Serang. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2). <https://doi.org/10.31506/jap.v10i2.6735>
- Sari, N., Noor, I., & Prasetyo, W. Y. (2015). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu (Studi pada Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4), 634–640.
- Sellag, K. (2016). Administrasi Dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasinya. *Ombak*, September, 1–229. <https://www.mendeley.com/viewer/?fileId=349a0ada-0d19-cc5f-2776-e90886da1735&documentId=e4a8153f-e14a-3a02-a647-dfbbb59f5582>
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). [http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf)
- Silvianis, R. (2015). Efektivitas Organisasi dalam Pelaksanaan Pembangunan

Infrastruktur Di Desa Sotol Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2013. *Jom FISIP*, 2, 1–14.

<https://www.neliti.com/publications/31813/efektivitas-organisasi-dalam-pelaksanaan-pembangunan-infrastruktur-di-desasotol>

Soegiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Sumirah, D. P. A. (2021). *Pngantar Manajemen Faktor Individu Dalam Organisasi*. February, 6.

Surminah, I. (2013). Pola Kerjasama Lembaga Litbang dengan Pengguna dalam Manajemen Litbang (Kasus Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat). *Jurnal Bina Praja*, 05(02), 101–112. <https://doi.org/10.21787/jbp.05.2013.101-112>

Susan, E. (2019). MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA Eri Susan 1. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(2), 952–962.

Susilowati, N., Anisykurlillah, I., Asrodi, M., Mahmud, A., Rahmawati, E., & Ananda Sasi, D. (2021). *Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Arto Desa Kenteng*. 25(2), 175–180.

Syah, H. (2020). PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DI DESA PENGKENDKAN KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA Skripsi. *Kaos GL Dergisi*, 8(75), 147–154.

<https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798>
<https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002>
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049>
<http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391>
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>

Wibawa, S. (2020). *Pengantar Manajemen Publik*. 1–11.

PERATURAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa